



EVALUASI PARTISIPASI  
POLITIK PEMILIH PADA  
PEMILU 2019 DI  
KABUPATEN BANGKA  
BARAT

LAPORAN PENELITIAN

Oleh: Budi Kurniawan, SIP, MPP

Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP,  
Universitas Lampung

## ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi partisipasi pemilih dalam pemilihan umum 2019 di Kabupaten Pangka Barat. Partisipasi politik dalam pemilihan umum atau diistilahkan dengan *voter turnout* telah menjadi concern banyak ilmuwan politik dan *stake-holders* kepemiluan. Umumnya mereka berpendapat semakin tinggi partisipasi dalam pemilu maka makin baiklah legitimasi politik dan kualitas demokrasi. Semakin banyak yang ikut pemilu maka sukseslah penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum. Semakin banyak partisipasi maka semakin tinggilah angka Index Demokrasi di daerah yang dihitung Badan Pusat Statistik setiap tahun untuk konteks Indonesia.

Namun masalah partisipasi memilih tidak sesederhana banyak-nya partisipasi memilih yang ikut pemilu. Perlu juga dievaluasi apakah jumlah yang banyak berbanding lurus pula dengan kualitas memilih masyarakat. Kesuksesan dalam jumlah yang banyak ikut melakukan pemungutan suara seharusnya diikuti pula dengan kualitas pemilu yang baik seperti rendahnya politik uang atau vote buying, hoax dan kampanye hitam.

### **Kata Kunci:**

**Voter Turnout, partisipasi politik, politik identitas, budaya politik, clientelism**

## Daftar Isi

1. Pendahuluan.....	3
A. Latar Belakang .....	3
B. Tujuan Penelitian .....	4
C. Kegunaan Penelitian.....	5
II. Tinjauan Teoritis .....	7
A. Partipasi Politik dan Budaya Politik .....	7
B. Voter Turnout, Polititik Identitas dan Clientelism .....	9
III. Metode Penelitian.....	12
IV. Profil Pemilu Desa Pebuar dan Desa Mayang .....	13
A. Desa Pebuar: Kantong Suara PKS dan Ustadz Zuhri .....	13
B. Desa Mayang: Basis tradisional PDIP.....	19
Penutup .....	24
V. Pemilih Melayu, Politik Identitas dan Clientelism .....	26
A. Budaya Politik Kritis dan Rendahnya <i>Trust</i> di Desa Mayang.....	26
A.1. Melayu Abangan .....	27
B. Pebuar: Desa Santri yang Guyub dan Partisipasi Tinggi .....	29
C. Caleg “Tionghoa” Bong Ming Ming ditengah Politik Identitias, dan Politik Uang .....	31
Kesimpulan dan Saran.....	33
A. Kesimpulan .....	33
B. Saran.....	33
Daftar Pustaka.....	35
Apendix.....	37
Foto Foto Kegiatan Penelitian:.....	37

# 1. Pendahuluan

## A. Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi partisipasi pemilih dalam pemilihan umum 2019 di Kabupaten Pangka Barat. Bangka Barat adalah salah satu kabupaten tertinggi di Indonesia dalam partisipasi pemilih hingga mencapai angka 82 persen. *Landscape* Bangka Barat menjadi menarik diteliti karena keragaman etnis menjadi salah satu fakta yang membuat partisipasi pemilih di Bangka Barat cukup signifikan merepresentasikan provinsi Bangka Belitung dan Indonesia.

Partisipasi politik dalam pemilihan umum atau diistilahkan dengan *voter turnout* telah menjadi concern banyak ilmuwan politik dan *stake-holders* kepemiluan. Umumnya mereka berpendapat semakin tinggi partisipasi dalam pemilu maka makin baiklah legitimasi politik dan kualitas demokrasi. Semakin banyak yang ikut pemilu maka sukseslah penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum. Semakin banyak partisipasi maka semakin tinggilah angka Index Demokrasi di daerah yang dihitung Badan Pusat Statistik setiap tahun untuk konteks Indonesia.

Namun masalah partisipasi pemilih tidak sesederhana banyak-nya orang atau pemilih yang ikut pemilu. Perlu juga dievaluasi apakah jumlah yang banyak berbanding lurus pula dengan kualitas memilih masyarakat. Kesuksesan dalam jumlah yang banyak ikut melakukan pemungutan suara seharusnya diikuti pula dengan kualitas pemilu yang baik seperti rendahnya *money politics* atau politik uang atau *vote buying* atau istilah ilmu politiknya dikenal dengan praktik *clientelism*. Selain itu pemilu yang berkualitas juga dievaluasi dari aspek bagaimana budaya politik masyarakat, apakah sekedar ikutan dimobilisasi elite, sekedar ikut pemilu karena ancaman aparat seperti era orde baru atau sebaliknya ikut pemilu dikarenakan ingin perubahan atau ingin

memberi *reward* bagi pemimpin politik yang dianggap telah berhasil. Sikap terakhir inilah dimana ikut pemilu dan memilih karena program kerja, visi misi dan evaluasi incumbent adalah perilaku ideal yang diharapkan banyak pengamat pemilu sebagai budaya politik tingkat tinggi *the civic culture*.

Lebih dari pada itu, ada sebuah fenomena menarik di Indonesia yakni dengan maraknya politik identitas terutama di media sosial. Pulau Bangka khususnya Bangka Barat adalah fenomena yang menarik jika melihat pemilu dalam konteks politik identitas. Fenomena menarik yang pertama adalah Bangka Barat memiliki Bupati pertahana yang berasal dari etnis Tionghoa. Kedua, Bangka Barat relatif secara etnis beragam dimana kecamatan Parit Tiga adalah salah satu kecamatan di mana etnis Tionghoa pertama kali bermigrasi ke Pulau Bangka dalam rangka menambang timah. Ketiga, Bangka Barat memiliki fenomena fakta bahwa sentra kecamatan-kecamatan etnis Melayu dimenangkan oleh Pasangan Jokowi-Maruf Amin di saat Pulau Sumatera dikuasai Pasangan Prabowo dan Sandiaga Uno. Pulau Bangka adalah lumbung suara pasangan Presiden 01 dengan kemenangan 63,23 persen, tertinggi di Sumatera mengalahkan Lampung 59,32 persen, Sumatera Utara 52,29 persen dan Kepulauan Riau 54,24 persen.

Fenomena diatas menjadi menarik ketika umumnya pengamat mengatakan bahwa faktor etnis lah yang menjadi penentu kemenangan dan kekalahan Jokowi di Sumatera. Mereka berargumen bahwa Jokowi menang dikarenakan faktor lebih “nJawani” ketimbang Prabowo di Lampung dan Sumatera Utara yang secara etnis didominasi etnis Jawa transmigrant. Mereka juga menganalisa bahwa politik etnis melayu cenderung ke Pasangan Prabowo-Sandi jika dilihat kemenangan Prabowo di daerah-daerah etnis Melayu seperti Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara bagian Timur, Jambi dan Aceh.

## B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan penelitian adalah hendak melakukan evaluasi partisipasi politik pemilih di pemilu 2019 yang lalu di Bangka Barat.

Selanjutnya ada beberapa **research objectives** yang digunakan sebagai batasan dan rambu-rambu utama penelitian ini agar tujuan penelitian ini tercapai yakni sebagai berikut;

Pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas partisipasi politik pemilih di Bangka Barat dan. Selama ini alat ukur partisipasi hanya berhenti pada level kuantitas tanpa meneliti lebih dalam seberapa berkualitasnya partisipasi politik masyarakat di pemilu 2019 yang lalu di Bangka Barat. Apakah partisipasi politik ini didasarkan apa yang disebut Futnam (2003) dalam “making democracy work” sebagai civic tradition atau civic culture jika mengacu pada karya classic Almond dan Verba (1965). Selain itu ada analisis evaluatif untuk menjawab mengapa suatu daerah tinggi partisipasinya dan suatu daerah rendah partisipasinya. Kedua, penelitian ini ingin berusaha mengevaluasi seberapa signifikan praktik-praktik *clientelism* seperti *vote buying* mempengaruhi preferensi pemilih. Ketiga, penelitian ini akan menganalisa sekaligus mengevaluasi pengaruh politik identitas di Bangka Barat. Menganalisa Apakah politik identitas baik dalam bentuk agama suku dan ras ataupun sebaliknya menebar ketakutan akan agama tertentu berpengaruh terhadap partisipasi pemilih yang tinggi.

### C. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas ada beberapa manfaat penelitian ini bagi stake-holder pemilu terutama penyelenggara pemilu seperti KPU, partai politik dan akademisi ilmu politik.

Pertama, secara keilmuan penelitian ini akan memberi sumbangsih bagi studi *voter turnout* di Indonesia paska pemilu 2019 termasuk dari aspek fenomena *clientelism* dan politik identitas. Peneliti belum menemukan referensi yang signifikan dalam hal ini dalam konteks politik identitas, dan *clientelism* terlebih khusus di Bangka Belitung yang memiliki *special case* di mana etnis Melayu yang cenderung berbeda dengan etnis melayu di Sumatera lainnya dalam hal pemilihan presiden.

Kedua, secara praktis penelitian ini akan memberi masukan kepada KPU DPR dan pemerintah dalam bentuk rekomendasi kebijakan agar dapat meningkatkan kualitas memilih di pemilu yang akan datang. Penelitian ini juga diharapkan memberi sumbangsih bagi pencegahan vote buying dan politik identitas yang saat ini sedang marak di Indonesia.

## II. Tinjauan Teoritis

Pada bab sebelumnya dibahas tentang latar belakang, tujuan dan manfaat penelitian. Bab ini akan membahas kerangka teoritis dalam peneliti melakukan penelitian ini. Kerangka teoritis pertama adalah membahas tentang perdebatan para ahli politik tentang partisipasi politik khususnya dalam pemilu. Bagian kedua akan membahas teori *voter turnout* dan juga membahas tentang tinjauan teoritis mengenai *clientelism*. Pada bagian terakhir akan menyajikan paparan teoritis tentang politik identitas dalam pemilu.

### A. Partipasi Politik dan Budaya Politik

Mengapa seorang pemilih memilih untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik telah menjadi concern ilmuwan politik sejak lama. Salah satu karya klasik yang banyak dikutip adalah karya Almond dan Verba (1965). Kedua begawan ilmu politik ini membagi budaya politik dalam hubungannya dengan partisipasi politik kedalam tiga katagori setelah melakukan studi perbandingan politik di lima negara yakni Amerika Serikat, Inggris, Mexico, Jerman dan Italia. Katagori pertama diistilahkan dengan budaya politik parokial yakni budaya politik dimana masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan politik sangat rendah, perhatian mereka terhadap dunia politik nyaris tidak ada. Almond dan Verba mencotohkan budaya politik di suku-suku pedalaman Afrika untuk menggambarkan budaya politik parokial. Katagori kedua diistilahkan dengan budaya politik subjek atau kaula. Budaya politik subjek atau kaula berkarakter masyarakat yang realatif maju secara ekonomi namun masih bersifat pasif. Mereka masih paham terhadap politik dan sistem politik namun acuh terhadap kegiatan politik dan enggan berpartisipasi. Katagori ketiga, katagori yang ideal diistilahkan dengan budaya politik partisipan atau *civic culture* dimana masyarat sudah baik secara ekonomi dan sosial ditambah berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik. Mereka memiliki kesadaran kritis untuk merubah kebijakan publik.



Kelemahan dari katagori-katagori yang diajukan Almond dan Verba diatas adalah tidak menjadikan factor political self-interest dan budaya kritis dalam menilai variable budaya politik. Faktanya banyak masyarakat yang sadar penuh secara politik namun tidak percaya dengan sistem politik yang berjalan dan tidak memiliki pilihan yang tepat dari calon calon yang ditawarkan dalam pemilu. Masyarakat seperti ini umumnya tidak memiliki kepentingan politik individual, paham politik namun pilihan yang ditawarkan dirasa tidak akan membawa perubahan.

Untuk itu kemudian teori Robert Putnam (2003) dirasa tepat untuk melihat budaya politik kritis dan partisipasi dalam kegiatan politik yang dihubungkan dengan *trust* atau kepercayaan terhadap sesama warga dan terhadap politisi yang menjalankan pemerintahan. Dalam studinya di Italia Putnam menemukan dua daerah yang berbeda di Italia dalam budaya politik. Masyarakat di Utara Italia lebih memiliki budaya politik *civic* yang lebih baik ketimbang daerah selatan. Dalam analisisnya *social capital* yang kemudian ada unsur *trust* di dalamnya menjadi faktor penentu dari berbedanya kedua daerah itu. *Trust* itulah kemudian menjadikan *social capital* yakni munculnya organisasi sukarela, ikut serta dalam pemilu, tingkat literasi politik yang tinggi dan kepercayaan terhadap sesama anggota masyarakat dan politisi menjadi modal utama dalam suksesnya sebuah pemerintahan. *Trust* lah yang kemudian menggerakkan masyarakat untuk aktif berpartisipasi menjalankan pemerintahan termasuk dalam hal ini ikut serta dalam proses pemilu dan pembuatan kebijakan publik.

Ide Putnam tentang social capital menjadi sebuah penemuan teori penting dalam melihat suksesnya sebuah pemerintahan. Sukses sebuah pemerintahan berarti sukses pula pembangunan. Ide Putnam kemudian menjadikan Bank Dunia mengadopsinya untuk menjadi syarat sebuah negara agar dapat sukses dalam pembangunan ekonomi. Ide Putnam juga diteruskan oleh beberapa ilmuan di berbagai negara termasuk Indonesia.

## B. Voter Turnout, Politik Identitas dan Clientelism

Jika pembahasan sebelumnya lebih bersifat umum tentang budaya politik dan partisipasi politik secara luas, maka teori *voter turnout* lebih spesifik memotret partisipasi politik dalam bentuk ikut pemilu. *Voter turnout* disini didefinisikan sebagai “as the absolute number of people voting in the election” (Geys, 2006: 638), Ilmuwan politik sendiri telah banyak melakukan experiment misalnya dalam menjawab factor factor apa saja yang mempengaruhi orang keluar rumah untuk memilih dalam pemilu atau voter turnout.

Ada beberapa research sebelumnya yang mengangkat tema tentang pengaruh usaha mobilisasi dan derasnya arus informasi mempengaruhi *voter turnout*. Studi dari Gerber and Green (2000) misalnya menjelaskan bahwa semakin banyak mobilisasi dan makin deras arus informasi tentang kandidat maka semakin tinggilah voter turnout. Studi lainnya yang cukup terkenal adalah studi yang mencari hubungan antara ketimpangan pendapatan dan voter turnout. Ditemukan fakta bahwa mereka yang berpenghasilan tinggi cenderung untuk ikut pemilu ketimbang mereka yang secara pendapatan termasuk katagori berpendapatan rendah (Iversen and Soskice 2006). Namun beberap studi yang disebut diatas punya beberapa kelauman jika diterapkan di Indonesia. Pertama, rentang idiologi partai di Indonesia bukanlah rentang idiologi kiri dan kanan dalam artian idiologi ekonomi politik. Kedua, idiologi partai di Indonesia lebih dalam konteks politik identitas dan aliran yakni perdebatan tentang isu agama, sedangkan isu ekonomi relatif sama diantara partai partai di Indonesia (Fossati 2019).

Untuk konteks Indonesia fenomena ikut pemilu atau menjadi golput dilakukan Fossati dan Coma (2019: 18). Menurut Fossati dan Coma

“turnout was positively affected by civic engagement, as measured by the density of associational life, by electoral district magnitude and electoral competitiveness. By contrast, population size and GDP per capita, urbanization rate and educational attainment depressed turnout. As for invalid voting, we found a positive association with urbanization and district magnitude, and a

negative association with educational attainment, religious polarization, macroeconomic performance and clientelistic mobilization”.

Dapat disimpulkan dari *research* Fossati diatas bahwa fenomena *turnout* di Indonesia dipengaruhi oleh keterlibatan sipil dengan contoh keterlibatan dalam organisasi organisasi sosial, semakin tingginya kompetisi antar calon semakin tinggi orang ikut pemilu.

Sedangkan untuk fenomena golput dengan mencoblos agar suara tidak valid disebabkan oleh faktor faktor seperti; pertama urbanisasi. Semakin padat sebuah daerah maka orang yang golput semakin rendah, namun semakin kota suatu daerah fenomena golput semakin tinggi pula. Kedua, semakin tinggi *income* suatu daerah maka semakin tinggi pula golput. Ketiga, Lebih menonjol dalam keberagaman agama kabupaten, dan pemilih akan lebih enggan untuk membuang suara mereka dengan pemungutan suara informal dalam keadaan seperti itu. Ke-empat, pemilih lebih enggan golput di daerah di mana politisi paling berhasil mengajukan ke pemilih melalui praktik personalistik-klientelistik. Point keempat menunjukkan bahwa semakin tinggi politik uang justru pemilih yang golput dengan merusak kertas suara semakin sedikit.

Studi tentang politik Indonesia akhir akhir ini banyak awalnya menyoroti fenomena clientelism. Paska pilkada Jakarta fenomena politik identitas menguat signifikan dan kembali menjadi kajian yang subur untuk diteliti oleh para ahli politik Indonesia. Salah satu karya penting tentang praktik clientelism dan vote buying adalah buku *democracy for sale* oleh Aspinall and Berenschot (2019). Buku ini mengangkat fenomena bahwa politik Indonesia menunjukkan bagaimana politik Indonesia dibangun atas dasar pertukaran uang tunai, barang dan bantuan, dan diorganisir melalui hubungan dan jaringan informal daripada partai dan lembaga formal. Maraknya studi tentang clientelism sedikit tersingkirkan oleh hadirnya politik identitas. Salah satu studi terbaru tentang politik identitas di Indonesia adalah dari Chin dan Tanasaldy. Fenomena Ahok membuat fenomena islamisme gagal dikarenakan perlawanan balik kelompok sekuler terhadap fenomena Islamisme. Perlawanan balik ini menjadi seru jika dilihat keributan

di sosial media seperti kasus Patung China di Tuban dan fenomena kepemilikan tanah di Yogyakarta (Chin and Tanasaldy, 2019: 974).

### III. Metode Penelitian

Bab sebelumnya telah mengeksplorasi tinjauan literatur terkait dengan penelitian ini. Tujuan utama bab ini adalah untuk membahas dan membenarkan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini akan menjadi penelitian komparatif yang akan menemukan kompleksitas antara budaya politik, *voter turnout* dan polarisasi etnis dalam pemilu 2019 yang lalu. Karena ini adalah fenomena sosial yang kompleks, berbagai metode teknik diperlukan untuk ini. Mengenai keadaan ini, penelitian ini akan melibatkan wawancara elit semi-terstruktur dan analisis dokumen.

Karena penelitian ini adalah penelitian *qualitative comparative case study research*, maka penelitian yang akan dilakukan adalah dengan membandingkan dua fenomena kasus extreme yang bertolak belakang. Metode komparatif bukan metode yang sederhana karena tidak mudah mengidentifikasi kasus yang sebanding. “Yang penting di sini adalah rasio antara jumlah varians dari variabel operatif dan jumlah varians dari variabel kontrol, yang diasumsikan nol, tetapi pada dasarnya tidak terkendali. Rasio ini harus sebesar mungkin. Ini dapat dimaksimalkan dengan meminimalkan varians dari variabel kontrol dan dengan memaksimalkan variabel independen dan dependen. Namun, jumlah varians dari variabel dependen tidak boleh menjadi pertimbangan dalam pemilihan kasus karena ini akan berprasangka dengan pertanyaan empiris ”(Lijphart, 1971, hlm. 163–164). Terkait dengan masalah ini, variabel dependen saya; budaya politik, seharusnya tidak menjadi pertimbangan. Namun, variabel independen saya adalah voter turnout; rasionya harus sebesar mungkin.”(1994 dikutip dalam Arifin et.al, 2015, hal.238).

Atas dasar logika diatas maka dipilihkan dua lokasi penelitian yang secara *voter turnout* berbeda secara extreme yakni yang paling banyak ikut pemilu dan paling sedikit ikut pemilu. Berdasarkan data dari KPU Bangka Barat, desa yang paling tinggi partisipasinya pada pemilu 2019 adalah desa Pebuar yakni sebesar 96 persen, sedangkan desa yang paling rendah angka partisipasinya adalah desa Mayang sebesar 71 persen.

## IV. Profil Pemilu Desa Pebuar dan Desa Mayang

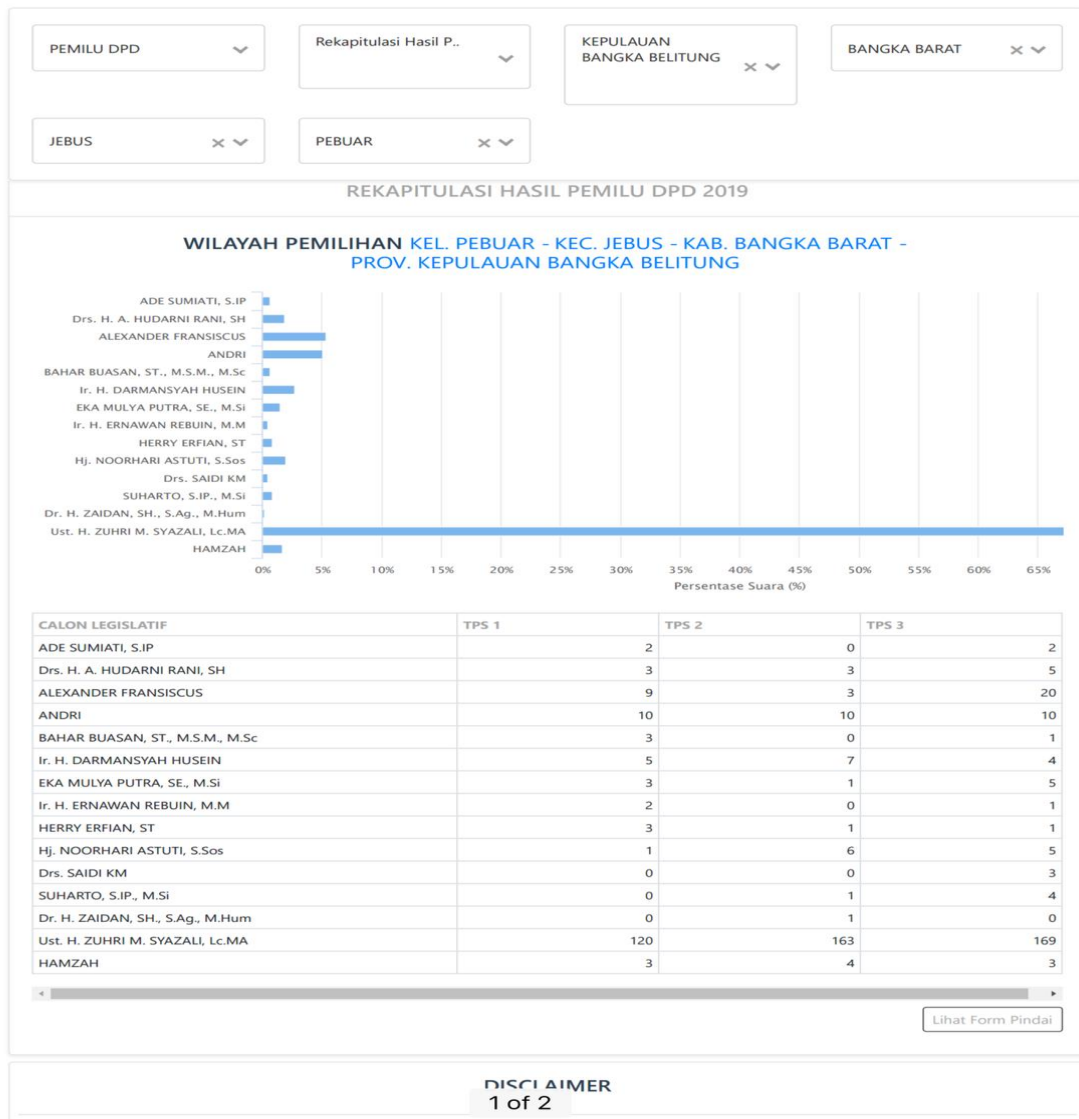
Bab sebelumnya telah membahas tentang metode penelitian yang menjadi landasan pemilihan sample lokasi penelitian dan cara mengumpulkan data. Karena lokasi penelitian ini adalah 2 lokasi yang berbeda secara ekstrem dalam variable partisipasi politik masyarakat dalam pemilu maka bab ini akan membahas secara deskriptif profil dua desa ini secara politik berdasarkan data pemilu 2019 yang lalu.

### A. Desa Pebuar: Kantong Suara PKS dan Ustadz Zuhri

Desa Pebuar adalah desa yang paling tinggi angka partisipasinya di Bangka Barat. Berikut table partisipasi pemilu 2019 di desa ini berdasarkan data KPU Bangka Barat 2019:

PEMILIH TERDAFTAR DPT	Desa Pebuar
LK	336
PR	314
JUMLAH	650
PENGGUNA HAK PILIH (DPT+DPTB+DPK)	
LK	324
PR	304
JUMLAH	628
TINGKAT PARTISIPASI (%)	96%

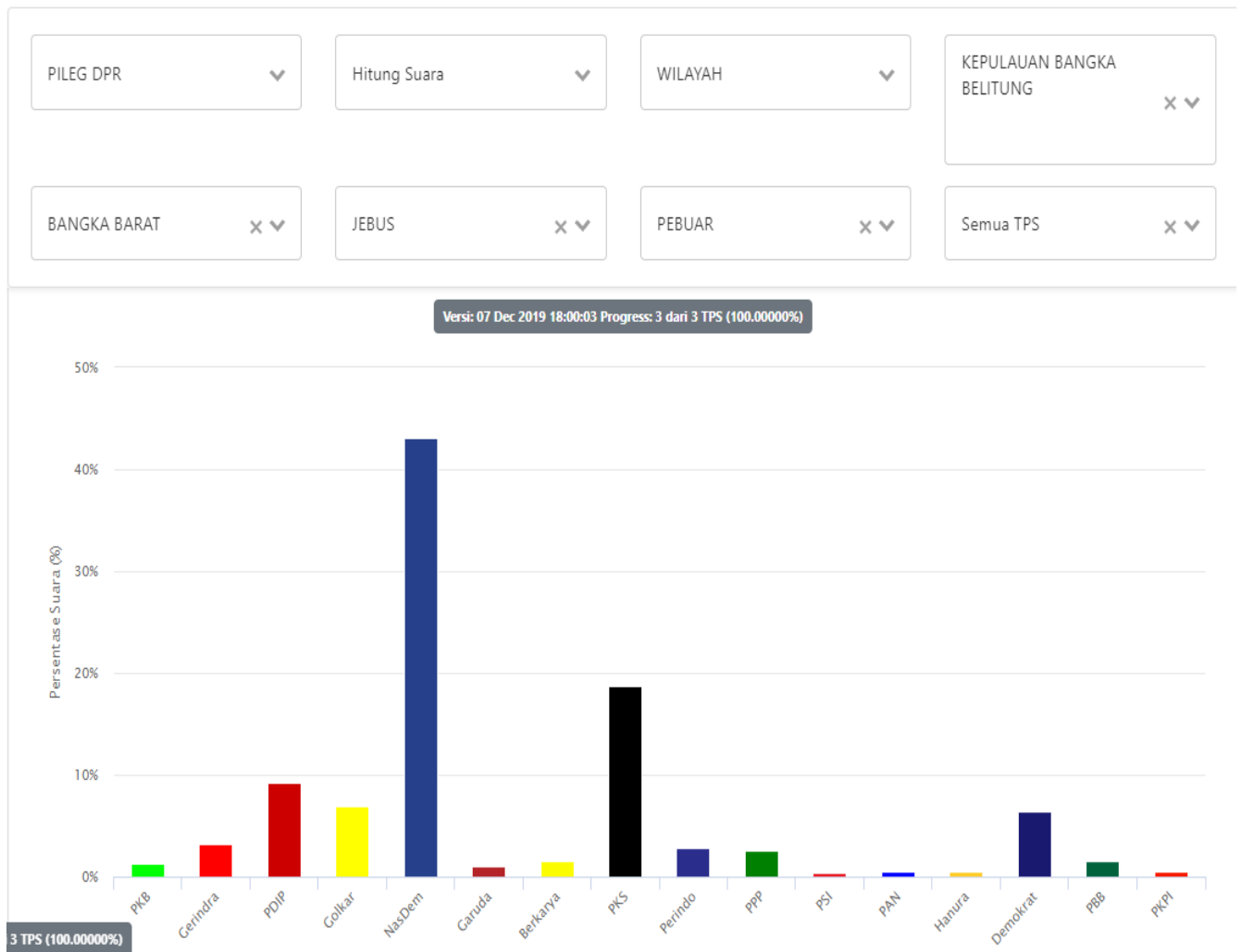
Hasil pemilu 2019 menunjukkan bahwa Ustadz Zuhri sebagai mantan bupati dan putra asli Jebus menunjukkan dominasinya dalam pemilihan anggota DPD di desa ini. Berikut tabel hasil pemilu DPD di desa ini dari website info kpu.



Besarnya suara Ustadz Zuhri M Syazali sayangnya tidak diikuti dengan kemenangan PKS dalam pemilu legislative di level DPR RI dimana partai Nasdem menempatkan seorang putera daerah Bangka Barat; Zuristyo Firmadata. Strategi nasdem terbukti sukses dengan menggusung *strong local man* di Bangka Barat dengan menempatkan kader asli Zuristyo sebagai nomor urut 1 dan *vote getter* mantan bupati Bangka

Tarmizi Saad sebagai nomor urut 2 yang berhasil menang besar dan menggerus suara di basis tradisional partai Islam di Mendo Barat.

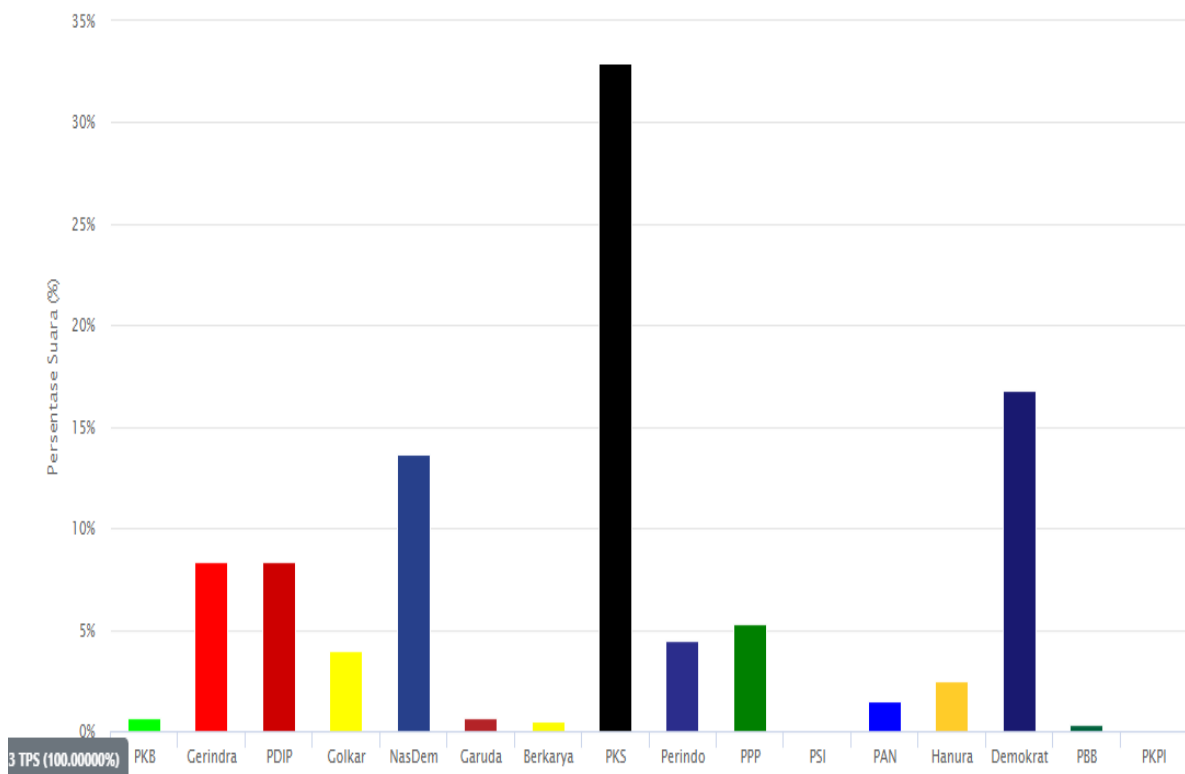
Berikut hasil pemilu legislative DPR RI di Desa Pebuar dari web info pemilu:



Untuk pemilu legislative DPRD Provinsi, Desa Pebuar menempatkan PKS sebagai pemenang. Suara PKS cukup signifikan disusul oleh Demokrat dan Nasdem. Caleg Bong Ming Ming yang secara kesukan adalah seorang Tionghoa muslim berhasil menjadi pemenang di desa ini.



Versi: 07 Dec 2019 18:00:03 Progress: 3 dari 3 TPS (100.00000%)

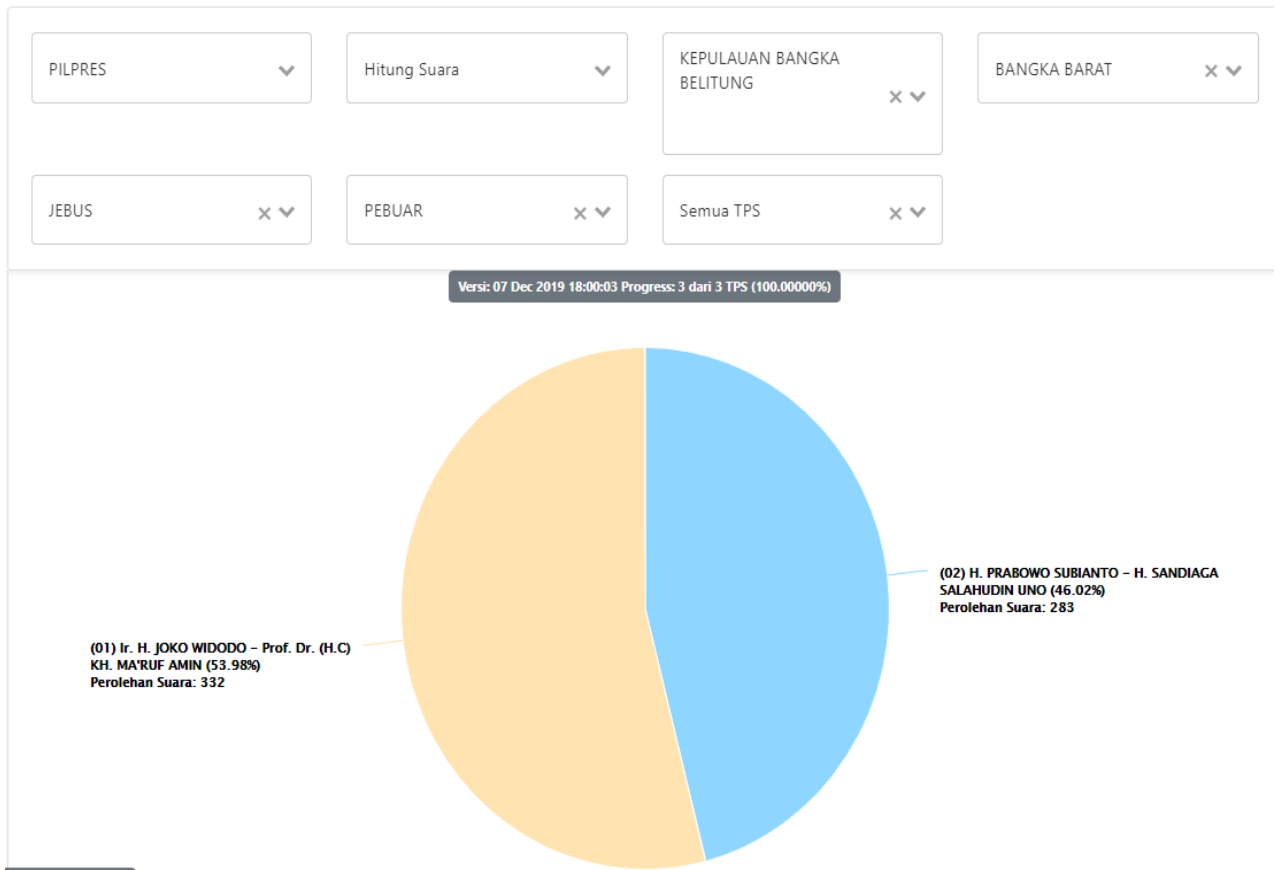


PKS menang mutlak untuk suara DPRD Kabupaten Bangka Barat. Di sini PKS menempatkan mantan kepala desa sebagai caleg PKS. Walaupun gagal duduk di kursi DPRD, mantan kepala desa Pebuar ini berhasil mengambil suara mayoritas di desa ini hingga hampir mendekati 60 persen. Berikut tabel perolehan suara pemilihan DPRD Kabupaten di Desa Pebuar dari website info pemilu KPU.



Secara keseluruhan Desa Pebuar adalah basis masa PKS dan pada masa orde baru adalah basis massa Golkar menurut hasil wawancara dengan Kepala Desa Jumri tanggal 3 Desember 2019.

Namun kemenangan PKS sebagai partai oposisi pemerintah incumbent dan mengukung pasangan Prabowo Sandi berbanding terbalik dengan suara pemilihan Presiden. Desa Pebuar menempatkan Pasangan Jokowi-Amin sebagai pemenang pilpres di daerah ini. Berikut tabel hasil pilpres di desa Pebuar:



Desa Pabuar menempatkan pasangan Jokowi-Amin sebagai pemenang dikarenakan beberapa hal berdasarkan wawancara dengan kepala desa dan sekretaris desa. Pertama, evaluasi ekonomi biasa saja, tidak ada penurunan ekonomi seperti di daerah Sumatera umumnya. Kedua, program dana desa telah membawa banyak perubahan di desa terutama dari sisi infrastructure dan pengentasan kemiskinan. Ketiga, tidak mempannya kampanye negative politik identitas karena media TV masih menjadi dominan ketimbang media sosial dimana kampanye hoax sering terjadi. Walaupun Desa Pebuar umumnya Bertani, turunnya harga komoditas pertanian seperti padi tidak membuat evaluasi ekonomi buruk karena ditutupi berhasilnya program dana desa.

## B. Desa Mayang: Basis tradisional PDIP

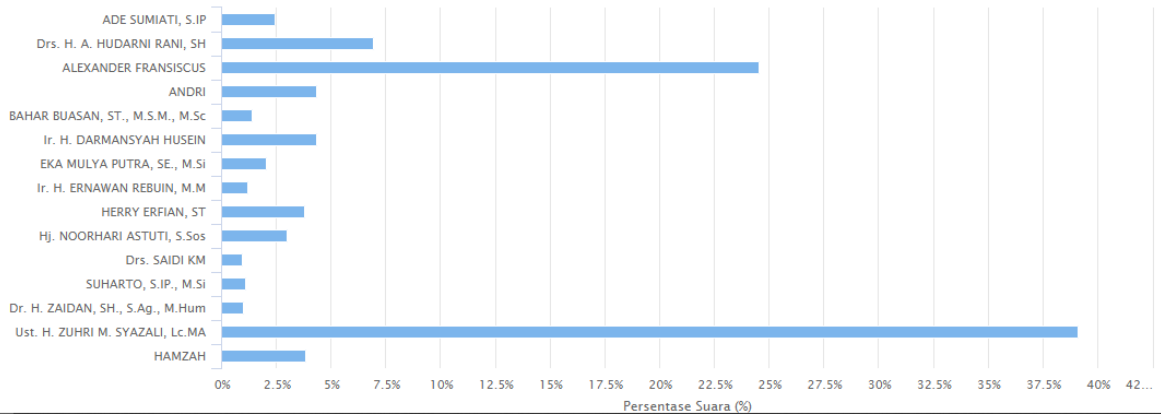
Desa Mayang adalah desa yang paling rendah partisipasi politiknya di Kabupaten Bangka Barat. Berikut data tabel partisipasi politik di pemilu 2019 yang lalu di Desa Mayang;

PEMILIH DPT	Mayang
LK	981
PR	971
JUMLAH	1952
PENGGUNA HAK PILIH (DPT+DPTB+DPK)	
LK	669
PR	717
JUMLAH	1386
TINGKAT PARTISIPAI (%)	71%

Walaupun sebagian besar penduduknya beretnis Melayu dan beragama Islam, Desa Mayang menempatkan seorang Alexander Fransiscus yang beragama Katholik dan beretnis Tionghoa secara signifikan yakni 24,5 persen. Walaupun begitu suara Ustadz Zuhri tetap menjadi pemenang walaupun tidak telak yakni sekitar 39,1 persen.

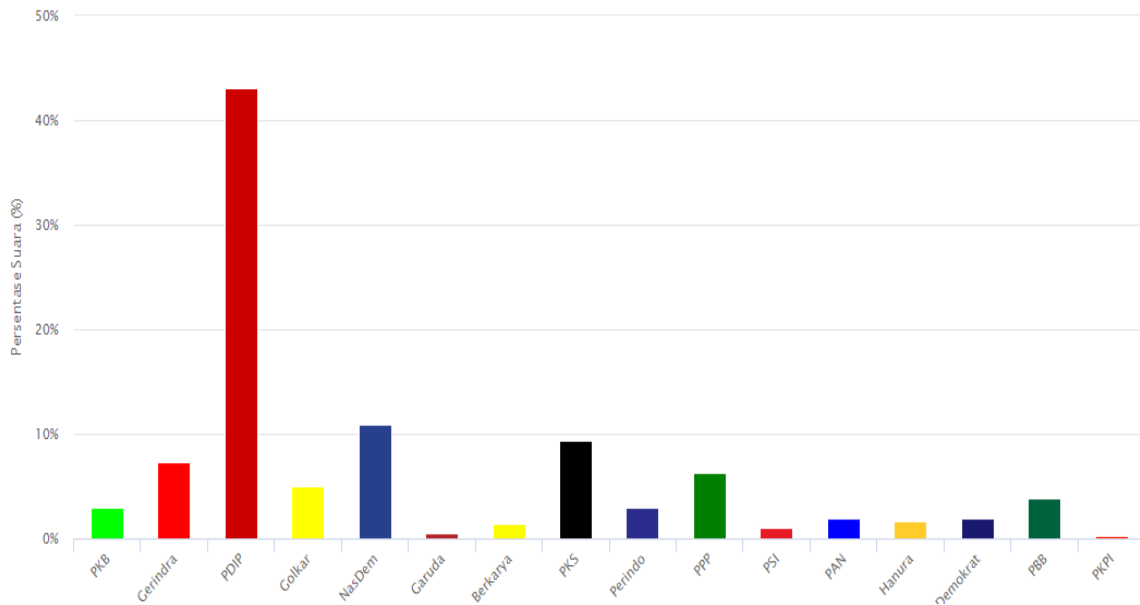
**REKAPITULASI HASIL PEMILU DPD 2019**

**WILAYAH PEMILIHAN KEL. MAYANG - KEC. SIMPANG TERITIP - KAB. BANGKA BARAT - PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



Untuk DPR RI, Desa Mayang adalah lumbung suara dan basis tradisional PDIP sejak orde baru. Kepala Dusun 1 Mayang dalam wawancaranya mengatakan bahwa pada masa orde baru pernah aparat militer marah karena Golkar kalah di Mayang oleh PDI. Setelah reformasi Mayang selalu dimenangkan PDIP untuk DPR RI walaupun caleg yang ditempatkan adalah seorang Tionghoa bernama Rudianto Tjen dan berhasil mengalahkan putera daerah melayu; Zuristy Firmadata dari Nasdem secara signifikan. Berikut tabel hasil pemilu DPR 2019 di Desa Mayang:

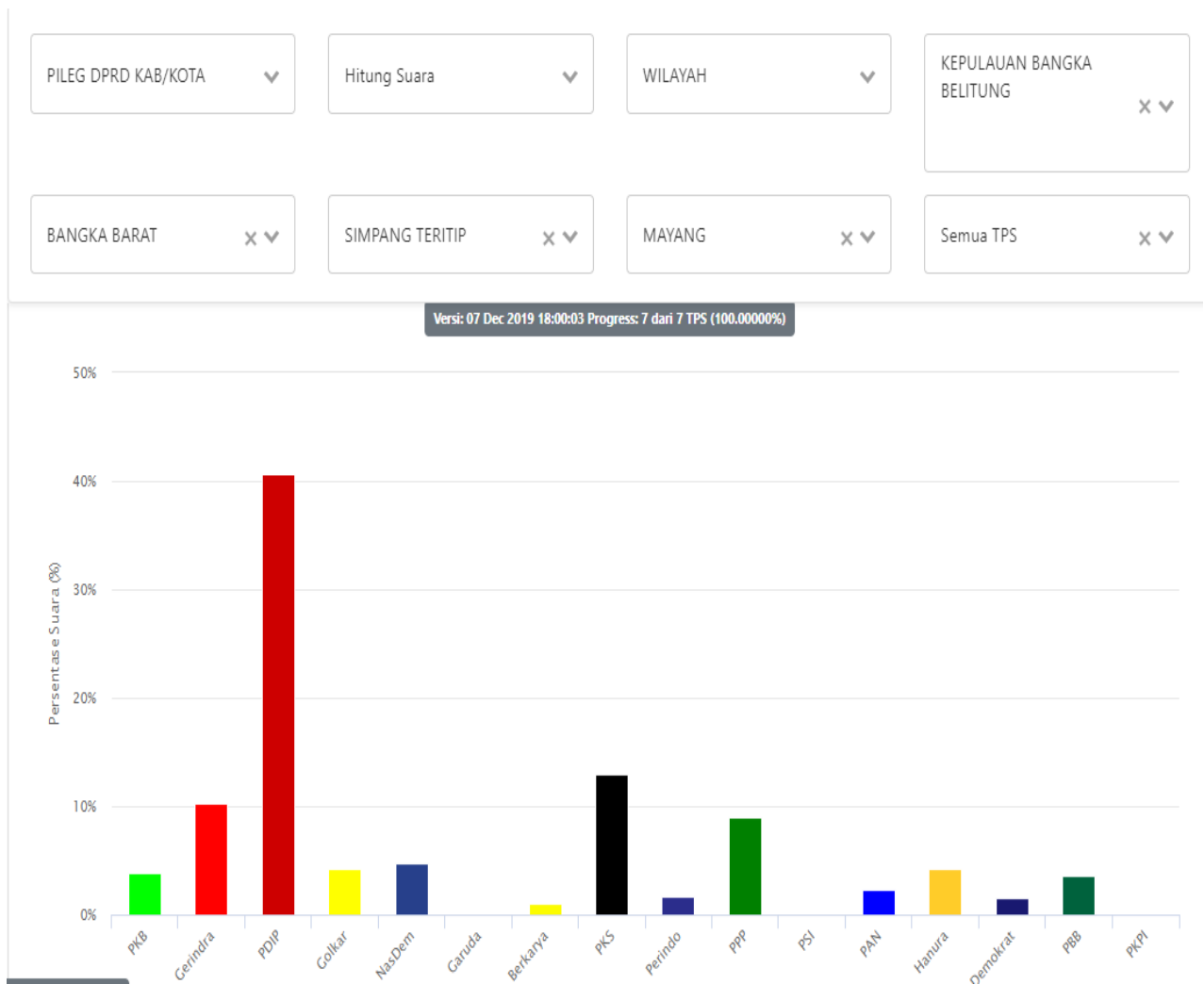
Versi: 07 Dec 2019 18:00:03 Progress: 7 dari 7 TPS (100.00000%)



Untuk DPRD Provinsi PDIP masih menjadi pemenang di Desa Mayang. Dimana 39,1 persen suara diambil PDIP sedangkan partai lain tidak ada yang mampu memperoleh suara diatas 10 persen. PKS sebagai pemenang kedua hanya memperoleh suara 9,6 persen. Berikut tabel hasil hitung suara pemilu DPRD Provinsi di Desa Mayang.



Untuk DPRD Kabupaten kembali PDIP adalah pemenangnya. Suara PDIP berhasil memperoleh suara mayoritas dengan suara mencapai 40,61 persen. Disusul PKS dengan jarak suara cukup jauh yakni 12, 95 persen, lalu Gerindra memperoleh 10,23 persen. Partai lain praktis dibawah 10 persen. Berikut tabel hasil pemilu DPRD Kabupaten di Desa Mayang pada pemilu 2019:



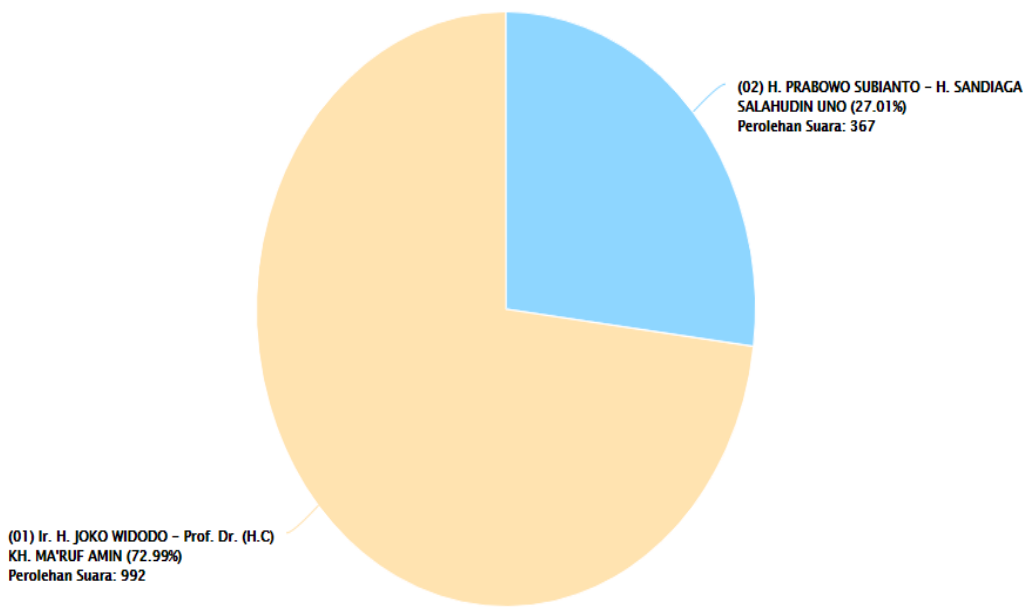
Hasil suara PDIP yang tinggi berkorelasi positif dengan suara kemenangan pasangan Jokowi-Amin di Desa Mayang. Jokowi menang 72, 99 persen di Desa Mayang. Dari hasil *focus group discussion* yang dihadiri kadus 1, kadus 2, kasi Pemerintahan dan kasi Kesejahteraan di balai Desa Mayang bahwa kemenangan PDIP dikarenakan faktor bahwa desa Mayang adalah basis tradisional kaum Marhaen sejak dahulu kala. Percampuran atas dasar perkawinan antara Jawa dan Melayu menjadikan politik aliran Abangan sebagai basis tradisional PDIP juga kuat di beberapa elite desa. Hampir semua perangkat desa adalah generasi kawin campur dengan etnis Jawa-Melayu. Dengan evaluasi ekonomi biasa saja maka Jokowi pun berhasil menang di Mayang. Evaluasi ekonomi terhadap incumbent ternyata menurut hasil wawancara tidak dipengaruhi oleh turunnya harga komoditas pertanian dan pertambangan dalam hal ini lada dan timah. Berikut data tabel kemenangan Jokowi di pilpres 2019 di Desa Mayang;



PILPRES ▾    Hitung Suara ▾    KEPULAUAN BANGKA BELITUNG ✕ ▾    BANGKA BARAT ✕ ▾

SIMPANG TERITIP ✕ ▾    MAYANG ✕ ▾    Semua TPS ✕ ▾

Versi: 07 Dec 2019 18:00:03 Progress: 7 dari 7 TPS (100.00000%)



## Penutup

Dari data sekunder yang diperoleh dari website resmi info pemilu dan wawancara dan FGD di Desa mayang dapat dibuat kesimpulan bahwa secara tradisional Desa Mayang adalah desa basis tradisional PDIP. Penempatan “putera daerah” oleh Nasdem tidak berhasil menggoyahkan suara PDIP yang mencalonkan ethnics

Tionghoa. Sedangkan di Desa Pebuar, strategi Putera Daerah berhasil oleh Nasdem dengan tergerusnya suara PKS di DPRD Pusat. Walau secara tipis Jokowi menang di Desa Pebuar dan menang telak di Mayang, adanya kesamaan bahwa evaluasi keadaan ekonomi tidak mengalami penurunan atau “sama seperti biasa” menjadi faktor mengapa Jokowi tetap menang. Penurunan harga komoditas pertanian dapat ditutupi dengan keberhasilan dana desa di dua desa ini.

## V. Pemilih Melayu, Politik Identitas dan Clientelism

Bab sebelumnya membahas tentang profil politik dua desa yang menjadi studi kasus penelitian ini yakni Desa Pebuar dan Desa Mayang di Bangka Barat. Secara demografis dua desa ini adalah desa Melayu dimana mayoritas etnis adalah etnis melayu. Pada bab ini akan dibahas beberapa temuan penting untuk menjawab tujuan penelitian sebagaimana yang dibahas di bab pendahuluan. Bab ini akan diawali dengan pembahasan mengenai budaya politik dua Desa ini. Selanjutnya akan dibahas pula mengenai fenomena politik identitas dan clientelism di Bangka Barat.

### A. Budaya Politik Kritis dan Rendahnya *Trust* di Desa Mayang

Desa Mayang merupakan daerah yang secara partisipasi politik rendah. Kami mengadakan FGD yang melibatkan empat orang penting di Desa Mayang yakni Pak Kasno Susanto (kasi pemerintahan), Rendy Pranata (kasi Kesra), Winarto (kadus 1) dan Supandi (kadus 2). Alasan utama yang menjadi sebab rendahnya partisipasi dari hasil FGD tanggal 3 Desember 2019 yang melibatkan *well informed persons* di Desa Mayang adalah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap elite politik local termasuk DPRD. Namun kepercayaan terhadap pemerintah Jokowi sendiri dinilai baik sehingga wajar jika kemudian menang secara mutlak. Desa Mayang sendiri dikenal dengan daerah yang memiliki masyarakat yang kritis terhadap pemerintah. Masyarakat sering protes terhadap aparat desa. Pak Kadus 1 Winarto misalnya berkata “Janji-janji seperti jalan-jalan bertahun tahun tidak dibikin”.

Secara sosiologis Desa Mayang sudah berbudaya sub-urban dari kota Mentok. Cirinya adalah mata pencaharian yang sudah beragam didominasi buruh dengan

jumlah 395 orang dan diikuti dengan tani sebanyak 330 orang. Petani sawit adalah sebagian besar yang dimiliki sedangkan bekerja sebagai buruh tambang adalah pekerjaan yang juga mendominasi walaupun mengalami penurunan akhir akhir ini. Ketika peneliti bertanya apakah karena faktor lebih memilih bekerja menambang ketimbang ikut pemilu ?, ke-empat peserta FGD kompak menjawab bukan karena itu, namun karena mereka memang tidak percaya lagi dengan elite politik terutama di level local yang tidak membawa perubahan.

Apa yang terjadi di Desa Mayang sebenarnya memperkuat tesis bahwa *trust* atau kepercayaan adalah hal yang penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik (Putnam 2003). Trust adalah bagian *social capital* yang menyebabkan masyarakat tergerak untuk terlibat dalam urusan-urusan politik. *Trust*lah yang kemudian menggerakkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk sama-sama bergerak demi keberhasilan pembangunan. Dalam kasus Desa Mayang rendahnya *trust* terhadap elite politik local membuat masyarakat enggan ikut pemilu. Namun jika kita telisik lebih dalam rendahnya *voter turnout* juga bisa disebabkan factor perilaku rasional bahwa lebih menguntungkan menambang ketimbang harus mencoblos pemilu ditengah tidak ada personal interest dan trust akan adanya perubahan ketika ikut pemilu. Kasus desa Mayang yang sudah secara sosiologis wilayah sub-urban juga membuktikan bahwa teori Fossati bahwa semakin sub-urban suatu wilayah semakin besar peluang golput terjadi (Fossati and Martinez i Coma 2019).

### A.1. Melayu Abangan

Tesis politik aliran yang dikemukakan Clifford Geertz tentang masyarakat Jawa yang menurutnya terbagi atas 3 aliran yakni priyayi santri dan abangan menarik untuk dibandingkan dengan masyarakat melayu di Bangka. Apakah tesis Geertz ini relevan juga untuk melihat fenomena masyarakat melayu Bangka ? Sebagai orang yang mengamati Pulau Bangka sejak lama, maka peneliti berani berargumen bahwa masyarakat melayu Bangka pun terbagi atas dasar politik aliran santri dan abangan.

Kasus perbandingan Desa Mayang dan Desa Jebus adalah bukti shahih yang memperkuat teori ini.

Menurut data yang peneliti peroleh dari balai Desa Mayang, secara ethnic penduduk Desa Mayang sudah bercampur dengan pendatang terutama Jawa. Tiga orang yang diwawancara mengidentifikasi diri mereka melayu walau secara darah memiliki darah campuran dengan pendatang dari Jawa. Sehingga definisi melayu disini lebih bersifat konstruktif ketimbang naturalis. Sama seperti di Malaysia melayu adalah konsep ethnic dengan katagori siapa saja yang beragama Islam dan berbahasa dan kebudayaan melayu.

Desa Mayang adalah bisa dikatakan desa yang bisa kita katagorikan desa Melayu Abangan. Terungkap dalam fgd bahwa Islam di desa Mayang tidak terlalu kuat jika dibandingkan Desa Pebuar apalagi desa desa santri di Mendo Barat. Tidak heran kemudian Desa Mayang adalah desa yang merupakan basis tradisional PDIP sejak era orde baru. Kadus 1 dalam FGD bercerita bahwa pada masa Orde Baru, para hansip desa Mayang disuruh jalan kaki dari kota Mentok oleh aparat militer sebagai bentuk hukuman atas kalahnya Golkar di desa itu.

Praktik keagamaan di Desa Mayang tidak sekuat dengan desa lainnya yang dikatagorikan desa santri. Sehingga dalam pilihan politik, non-muslim cukup memperoleh suara yang signifikan di pemilu DPD. Alexander Fransiscus yang beragama Katholik dan berethnis Tionghoa secara signifikan yakni 24,5 persen. Etnis Tionghoa dengan Asumsi yang beragama non-Islam dan non hindu sendiri menurut data desa hanya berjumlah 5.31 persen dari total penduduk.

Melayu Abangan di Mayang secara tradisional tidak akan dipengaruhi oleh praktik hoax di media sosial tentang Jokowi. Dalam FGD misalnya para peserta sepakat bahwa politik identitas yang berkempanye hitam tentang keislaman Jokowi tidak berpengaruh terhadap masyarakat Mayang. Walaupun umumnya masyarakat sudah

merata menggunakan media sosial namun mereka mampu menyaring berita hoax dari media sosial. Hal yang serupa ketika ditanya tentang politik uang. Politik uang juga tidak dianggap berpengaruh terhadap pilihan warga.

Banyak analisa mengatakan bahwa turunnya komoditi ekspor seperti karet dan sawit menyebabkan ekonomi Sumatera lesu. Faktor evaluasi pemilih atas kegagalan ekonomi terhadap pemerintah Jokowi di Sumatera dianggap menyebabkan kalahnya Jokowi di Sumatera. Namun, berbeda dengan di Mayang, walaupun secara ekonomi dianggap prestasi ekonomi Jokowi biasa saja namun Jokowi secara umum tetap dianggap Presiden yang dianggap berhasil. Walaupun karet dan timah sebagai komoditi utama desa Mayang sedang mengalami kelesuan namun kepercayaan terhadap Jokowi relatif lebih tinggi ketimbang elit lokal.

Desa Mayang mengingatkan kita kepada pemilih basis tradisional kaum abangan di Jawa Tengah. Walaupun prestasi Jokowi dianggap biasa saja secara pertumbuhan ekonomi, namun kaum abangan Jawa Tengah tetap menjadi basis PDIP dan Jokowi. Pilkada Bangka Barat 2020 akan datang akan menempatkan calon incumbent double minortias etnis Tionghoa dan Katholik yakni Marcus. Menarik ditunggu apakah Desa Mayang akan jadi basis Markus atau Markus akan kalah tipis dari calon melayu abangan pula. Jika ada calon bupati seorang melayu abangan dimunculkan partai politik. Maka bisa jadi dia akan menang walau tidak dicalonkan PDIP.

## B. Pebuar: Desa Santri yang Guyub dan Partisipasi Tinggi

Pertama kali datang ke Desa Pebuar kesan pertama yang didapat desa ini adalah desa yang terpencil dengan infrastuctur jalan yang jelek. Infrastuctur desa Pebuar memang relative lebih buruk ketimbang kota Kecamatan Jebus. Masalah infrastuctur ini memang menjadi keluhan warga menurut wawancara dengan kepala desa. Namun

menurut kepala desa “alhamdulillah telah dianggarkan untuk tahun depan ada perbaikan”.

Walaupun secara infrastruktur buruk, namun desa ini dipimpin kepala desa yang religius. Menurut kepala desa, jamaah sholat subuh berjamaah di desa ini lumayan besar jika dibandingkan desa lain yang secara keislaman kurang kuat (baca: melayu abangan). Peneliti sendiri menyempatkan diri sholat dhuhur bersama dan mengamati praktik kelsalaman di desa ini.

Secara umum kita katagorikan Desa ini merupakan desa melayu santri sebagaimana daerah Jebus lainnya. Secara historis pengaruh ulama Palembang penyebar agama Islam di Jebus KH Chottamarasyid bin Usman berpengaruh besar di daerah ini. Kacamatan Jebus sendiri tahun 1955 adalah daerah basis Masyumi dengan tokoh terkenalnya kepala Desa Jebus yakni Muhammad Ali yang merupakan ayahanda dari Professor Sofian Effendi, mantan rektor UGM. Berbeda dengan Jebus, maka kacamatan Parittiga adalah daerah dimana migrasi suku Tionghoa masuk ke Pulau Bangka untuk menambang Timah. Parittiga adalah daerah basis PNI dahulu kala dan PDIP hari ini.

Karena daerahnya berbasis melayu santri maka partai Islam PKS menang besar di daerah ini kecuali untuk DPR RI dimana calon PKS relative tidak dikenal. Berbeda dengan Nasdem yang calegnya merupakan putera daerah Bangka Barat. Ustadz Zuhri yang juga putera asli Jebus dan salah satu tokoh PKS Bangka Belitung serta mantan Bupati Bangka Barat menang mutlak di daerah ini. Pada pilkada sebelumnya walau dikalahkan Parhan Ali di pilkada, di Pebuar Ustadz Zuhri tetap menang. Hal-hal ini mengukuhkan bahwa desa Pebuar relative mirip dengan basis kaum santri di Sumatera umumnya yang memilih partai Islam modernis seperti PKS dan PAN atau Masyumi di tahun 1955.

Salah satu faktor penyebab tingginya partisipasi masyarakat di Desa Pebuar dari hasil wawancara dengan kepala desa adalah tingginya kepercayaan antar kepala desa dan warga desa dan sesama warga. Budaya guyub masih relative tinggi dimana masyarakat sangat mudah dikumpulkan untuk bermusyawarah. Himbauan kepala desa untuk ikut mencoblos diikuti warga dengan kepercayaan tinggi.

Secara umum masyarakat Pebuar adalah petani. Ketika harga komoditas turun namun evaluasi penduduk terhadap ekonomi dianggap biasa saja. Sehingga walaupun tipis, Jokowi tetap menang di Pebuar. Evaluasi terhadap kinerja ekonomi pemerintah Jokowi menurut kepala desa juga dipengaruhi oleh prestasi dana desa yang banyak merubah wajah desa terutama di bidang pengentasan kemiskinan.

Tingginya angka partisipasi pemilih di Desa Pebuar dikarenakan budaya guyub dan trust memperkuat teori Putnam (1996) tentang trust dan social capital. Semakin tinggi kepercayaan terhadap sesama warga maka semakin guyublah sebuah daerah. Semakin guyub ditambah kepercayaan terhadap pemerintah desa yang tinggi membuat partisipasi warga di forum musyawarah desa dan pemilu pun tinggi. Di sisi yang lain kondisi sosiologis daerah yang perdesaan membuat masyarakat desa lebih mudah dimobilisasi untuk ikut pemilu ketimbang daerah yang sub urban seperti Desa Mayang.

### C. Caleg “Tionghoa” Bong Ming Ming ditengah Politik Identitas, dan Politik Uang

Namanya Bong Ming Ming, beliau adalah media darling DPRD Provinsi Bangka Belitung. Ulasan kritisnya memenuhi media massa di Bangka Belitung. Walaupun tetap bernama Tionghoa namun beliau menjadi mualaf sejak kuliah dan menjadi aktivis PKS sekaligus menjadi calegnya dan telah terpilih dua priode.



Yang menarik dari Bong Ming Ming adalah identifikasi dirinya. Bagi masyarakat pemilih melayu dia dianggap melayu karena beragama Islam namun bagi masyarakat Tionghoa dia dianggap bukan lagi Tionghoa. Sehingga tak heran dia kalah di kantong kantong Tionghoa namun justru menang di kantong-kantong melayu santri. Suara beliau signifikan di daerah Tionghoa di Dusun Anyai, Desa Air Mendayung, Simpang Tritip. Hubungan keluarga dekat karena disitulah akar historis keluarga beliau menjadikan Bong Ming Ming menang di Desa Anyai walaupun secara mayoritas adalah etnis Tionghoa.

Fenomena identitas Bong Ming-Ming mengingatkan kita kembali kepada bagaimana etnis itu dikonstruksi ketimbang naturalis karena hubungan darah. Melayu di Bangka memiliki kesamaan dengan di Malaysia ketika memperlakukan Tionghoa muallaf. Seorang Tionghoa dianggap melayu jika masuk Islam (Nagata 1974). Tidak lagi menjadi Tionghoa kemudian ketika masuk Islam. Sebaliknya tidak dianggap melayu jika keluar dari agama Islam.

Fenomena kedua dari Bong Ming Ming adalah fenomena bagaimana modal politiknya di pileg yang sama sekali tidak memasang spanduk dan baliho. Dalam wawancaranya tanggal 4 Desember 2019, Bong Ming Ming mengaku hanya menghabiskan modal 50 juta rupiah saja. Wawancara dengan asisten pribadi beliau di tanggal yang sama mengatakan cara kampanye Bong Ming Ming berbeda dengan caleg yang lain yang jor-joran dengan politik uang dan barang. Bong Ming Ming hanya berusaha membantu dan merawat konsituen dengan memanfaatkan jaringan ke gubernur seperti membantu mengurus proposal masjid agar dibiayai pemerintah, membantu orang yang sakit tidak berobat agar gratis dengan memanfaatkan jaringan yang ada.

Bong Ming-Ming membukikan bahwa menjadi calon legislatif tidak melulu soal uang. Memanfaatkan kapasitas sebagai caleg yang bisa membuat opini public di media menjadikan dia juga populer. Cara berkampanye di media sosial dengan membuat akun di facebook dan akun Instagram membuat dia juga terkenal di kalangan pemilih muda.

# Kesimpulan dan Saran

## A. Kesimpulan

Secara umum dapat disimpulkan faktor *trust* adalah factor utama yang menyebabkan tinggi atau rendahnya partisipasi politik. Hal ini terbukti dengan hasil wawancara lapangan di Desa Mayang dan Desa Pebuar. Secara umum masyarakat Melayu Bangka dapat dikategorikan menjadi dua arus utama yakni melayu Santri dan melayu abangan. Politik identitas dalam pemilu legislative tidak terlalu besar pengaruhnya di desa-desa yang penduduknya melayu. Di desa Mayang misalnya walaupun kader utama yang dicalonkan PDIP di DPR RI adalah seorang Tionghoa namun PDIP tetap menjadi partai pemenang di daerah ini. Faktor evaluasi ekonomi incumbent di pilpres tidak terlalu signifikan mempengaruhi preferensi pemilih untuk pindah ke calon lain. Kondisi ekonomi yang dianggap biasa saja tidak membuat Jokowi kalah di Bangka Barat. Sebaliknya program dana desa yang dirasakan warga membuat Jokowi menang di daerah yang sejatinya secara partai dikuasai PKS yang merupakan oposisi Jokowi.

## B. Saran

Secara teknis bagi KPU untuk meningkatkan partisipasi politik bisa dikatakan sangat berkaitan erat dengan tingkat *trust* masyarakat terhadap antar sesama masyarakat dan terhadap pemerintah. Sehingga menjaga tata kelola pemilu yang baik adalah yang bisa dilakukan KPU untuk membuat masyarakat percaya bahwa pemilu atau pilkada yang akan datang benar benar dilakukan secara jujur dan adil.

Untuk rekomendasi penelitian selanjutnya adalah sangat menarik jika bisa memotret kampung-kampung Tionghoa secara ethnografi. Pemilih Tionghoa adalah kajian yang sangat menarik untuk didalami. Moment pilkada yang akan datang ketika calon incumbent mencalonkan diri akan menjadi moment yang menarik untuk memotret partisipasi pemilih Tionghoa di pilkada. Fakta menarik di kecamatan Parittiga walupun

Gerindra menang dalam pemilihan legislative DPRD Kabupaten di beberapa TPS berbasis pemilih Tionghoa, ternyata calon presiden dan ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto kalah telak dari Jokowi. Ini bisa menjadi hipotesis bahwa etnis Tionghoa lebih memilih berdasarkan kesamaan etnis ketimbang ideologi partai sekalipun karena Gerindra mencalonkan caleg Tionghoa di daerah itu. Ini juga membuktikan bahwa Jokowi secara mutlak didukung oleh etnis Tionghoa. Fenomena ethnic atau agama minoritas memilih partai yang dianggap lebih pluralis seperti PDIP sebenarnya fenomena biasa saja di dunia. Salah satu basis emilih tradisional partai democrat di Amerika misalnya adalah kalangan kulit hitam dan Yahudi. Begitupula dengan di Inggris, pemilih Pakistan lebih memilih partai buruh ketimbang konservatif. Untuk membuktikan hipotesis-hipotesis diatas penelitian selanjutnya akan sangat menarik dilakukan bagi mereka yang concern terhadap masalah politik identitas dan voting behaviour.

## Daftar Pustaka

- Almond, Gabriel A., and Sidney Verba. 1965. *Electoral Studies The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations, an Analytic Study*.
- Aspinall, Edward, and Ward Berenschot. 2019. Cornell University Press *DEMOCRACY FOR SALE Elections, Clientalism, and the State in Indonesia*.
- Chin, James, and Taufiq Tanasaldy. 2019. "The Ethnic Chinese in Indonesia and Malaysia: The Challenge of Political Islam." *Asian Survey* 59(6): 969–77.
- Fossati, Diego. 2019. "The Resurgence of Ideology in Indonesia: Political Islam, Aliran and Political Behaviour." *Journal of Current Southeast Asian Affairs*.
- Fossati, Diego, and Ferran Martinez i Coma. 2019. "Exploring Citizen Turnout and Invalid Voting in Indonesia: Two Sides of the Same Coin?" *Contemporary Politics*.
- Gerber, Alan S., and Donald P. Green. 2000. "The Effects of Canvassing, Telephone Calls, and Direct Mail on Voter Turnout: A Field Experiment." *American Political Science Review*.
- Geys, Benny. 2006. "Explaining Voter Turnout: A Review of Aggregate-Level Research." *Electoral Studies*.

Iversen, Torben, and David Soskice. 2006. "Electoral Institutions and the Politics of Coalitions: Why Some Democracies Redistribute More than Others." *American Political Science Review*.

Lijphart, A. (1971). Comparative politics and the comparative method. *American Political Science Review*, 65(3), 682–93.

<https://doi.org/10.2307/1955513>

NAGATA, JUDITH A. 1974. "What Is a Malay? Situational Selection of Ethnic Identity in a Plural Society." *American Ethnologist*.

Putnam, Robert D. 2003. "Making Democracy Work." In *The Civil Society Reader*,.

## Apendix

Foto Foto Kegiatan Penelitian:



Keterangan Gambar: KPU Bangka Barat hari pertama



FGD di Desa Mayang tanggal 3 Desember 2019



Wawancara dengan Kepala Desa Pebuar dan Sekretaris Desa



Kondisi Jalan Desa Pebuar



Wawancara dengan Bong Ming Ming, anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung daerah pemilihan Bangka Barat.